

Keterlibatan Politik Tuan Guru dalam Pengelolaan Pondok Pesantren di Lombok Utara (Multi Kasus)

Muliani¹, Ismail², Muh. Saleh³

Universitas Islam Negeri Mataram, NTB, Indonesia
email: ¹iyemuly@gmail.com

ABSTRACT

Tuan Guru is an essential part of the Islamic boarding school and is a characteristic of the pesantren community. Tuan Guru's position is not only as a formal leader but also as an informal leader whose job is to empower the community. Tuan Guru also functions as a moral force that participates in providing normative awareness of the community. The purpose of this study was to find out the forms of teacher involvement in politics, the constraints and impacts on Islamic boarding schools in North Lombok Regency. The research method used is qualitative research. The research data is described or described in the form of a description according to the actual situation. There are two sources of data in this research, namely primary data obtained directly from informants and secondary data obtained from books relevant to the problem under study. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out logically and systematically with four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of this study indicate that the form of Tuan Guru's involvement in politics in Islamic boarding schools in North Lombok Regency is intended to spread and maintain Islamic teachings and values, exercise control in society, help solve social problems where Tuan Guru is a problem solver for problems that arise, faced by society, and become agents of social change. In addition, it is carried out in the form of practical politics and indirect politics. Constraints faced are delinquency of students (santri), indiscipline, motivation, unhealthy social environment, attention of parents of students and economic ability of parents of students. and the impact is the increasing social status, can be of wider benefit to the community, can grow new insights and experiences and become more alert or introspective where Tuan Guru being a politician means being a person who is always aware of where the political world is.

Keywords: Politic, Tuan Guru, Islamic Boarding School

ABSTRAK

Tuan Guru merupakan bagian hakiki dari pondok pesantren dan menjadi ciri khas masyarakat pesantren. Kedudukan Tuan Guru tidak hanya sebagai pemimpin formal tetapi juga sebagai pemimpin informal yang tugasnya memberdayakan masyarakat. Tuan Guru juga berfungsi sebagai moral force yang ikut serta memberikan kesadaran normatif terhadap masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bentuk keterlibatan tuan guru dalam politik, kendala dan dampaknya di pondok pesantren Kabupaten Lombok Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif Data hasil penelitian dideskripsikan atau dijabarkan dalam bentuk uraian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara logis dan sistematis dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara adalah diarahkan untuk menyebarkan dan mempertahankan ajaran dan nilai-nilai Islam, melakukan kontrol dalam masyarakat, membantu memecahkan persoalan kemasyarakatan di mana tuan guru sebagai problem solver bagi persoalan yang dihadapi masyarakat, dan menjadi agen perubahan sosial. Selain itu dilakukan dalam bentuk politik praktis dan politik tidak langsung. Kendala yang dihadapi yaitu kenakalan santri (santri), ketidaksiplinan, motivasi, lingkungan pergaulan yang tidak sehat, perhatian

orang tua santri dan kemampuan ekonomi orang tua santri. dan dampaknya adalah semakin meningkatnya status sosial, dapat bermanfaat secara lebih luas kepada masyarakat, dapat menumbuhkan wawasan dan pengalaman baru dan menjadi lebih waspada atau mawas diri diamana tuan guru menjadi seorang politisi berarti menjadi seorang yang selalu waspada dimana dunia politik.		
Kata Kunci: Politik, Tuan Guru, Pondok Pesantren		
<i>Submitted:</i> 15 Maret 2022	<i>Revised:</i> 28 April 2022	<i>Accepted:</i> 17 Mei 2022
<i>Final Proof Received:</i> 29 Mei 2022	<i>Published:</i> 30 Juni 2022	
<i>How to cite (in APA style):</i> Muliani, Ismail, & Saleh, M. (2022). Keterlibatan Politik Tuan Guru dalam Pengelolaan Pondok Pesantren di Lombok Utara (Multi Kasus). <i>Schemata</i> , 11 (1), 23-38		

PENDAHULUAN

Tuan guru merupakan sebuah entitas yang memiliki pengaruh besar dalam arus sosial politik di Indonesia. Pengaruh itu terutama dibangun oleh para Tuan Guru dengan menyandarkan diri pada institusi yang berbasis pada pendidikan (Islam) yang bernama pesantren yang menempatkan diri ulama, Tuan Guru patron dengan modal pengetahuan agamanya. Terlebih pesantren- pesantren tersebut kebanyakan dibangun di kampung-kampung, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang intens antara Tuan Guru, pesantren, dengan masyarakat sekitar. Modal pengetahuan dan posisi Tuan Guru sebagai entitas tertinggi di institusi pesantren tersebut, menempatkan para Tuan Guru sebagai sosok dengan ketokohan yang sentral, terutama di masyarakat berbasis Islam tradisional.¹

Tuan Guru merupakan sosok orang tua, guru serta ulama yang patut dihormati dan cukup disegani karena mereka memberikannasihat, ilmu dan pembelajaran. Dalam kehidupan, Tuan Guru mempunyai peranan cukup penting karena merupakan tokoh yang dijadikan sebagai panutan. Hegemoni Tuan Guru yang sangat besar terhadap santri dan masyarakat sekitar kadang mampu memberikan implikasi non logis bagi masyarakat. Segala perkataan Tuan Guru selalu dianggap benar; segala hal yang diperintahkan Tuan Guru dianggap bertujuan untuk kebaikan dunia akhirat, dan semua yang dilakukan Tuan Guru jauh dari unsur kesalahan.

Tuan Guru merupakan bagian hakiki dari pondok pesantren. Seringkali ia merupakan seorang pendiri pesantren itu sendiri. Sudah sepatutnya pertumbuhan suatu pesantren semata-mata tergantung pada kemampuan pribadinya. Ketokohan Tuan Guru merupakan ciri khas dalam masyarakat pesantren, ini terjadi karena budaya masyarakat Indonesia yang paternalistik tetapi pribadi Tuan Guru sendiri yakni gelar yang tercipta melalui proses teologis. Kedudukan Tuan Guru tidak hanya sebagai pemimpin formal pondok pesantren semata melainkan sebagai pemimpin informal (informal leaders)

¹ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2003), 23.

yang tugasnya memberdayakan masyarakat. Tuan Guru juga berfungsi sebagai moral force yang ikut serta memberikan kesadaran normatif terhadap masyarakatnya.²

Hubungan antara Tuan Guru dan para umatnya cukup dekat, dan peranan Tuan Guru cukup besar dalam kehidupan umatnya. Segala yang disampaikan oleh Tuan Guru niscaya akan ditiru oleh umatnya. Dalam masyarakat Lombok Utara, Tuan Guru paling dihormati dibandingkan golongan sosial yang lain. Tuan Guru memiliki penghormatan sosial dari masyarakatnya. Tuan Guru akan lebih dihormati kalau ia memiliki kharisma, karena kelebihan ilmu agamanya itu. Pesantren yang awalnya erat kaitannya dengan segala bentuk pengajaran norma, mulai terkikis dan berubah sebagai ajang kampanye. Hampir mayoritas Tuan Guru di pesantren menjadi bagian dalam partai politik dan mengusung mereka sebagai kandidat kuat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Fenomena ini sempat memberikan perbedaan persepsi adanya pro dan kontra dalam masyarakat.

Dunia tuan guru merupakan dunia yang dipenuhi dengan nilai-nilai moral, kebaikan dan kebajikan. Sedangkan politik penuh dengan intrik, lumpur, dan noda. Individu yang memegang kekuasaan akan membuatnya terlena dan menjadi lupa daratan. Legitimasi Tuan Guru bukanlah diperoleh melalui jalan kekuasaan, tetapi sikap dan tindakan moralnya, disamping memiliki otoritas keagamaan. Jadi, ketika turut serta ke dunia politik bukan meneguhkan pamor dan karisma seorang Tuan Guru, tetapi sebaliknya. Tuan Guru akan dihegemoni oleh para politisi lain yang terjun di bidang tersebut.

Pandangan kedua berada di posisi sebaliknya yang berpendapat bahwa justru karena dunia politik praktis yang selama ini dianggap noda dan kotor sehingga perlu dibenahi dan diluruskan.³ Sosok Tuan Guru yang bersih, berilmu dan bermoral berkewajiban untuk membenahinya yakni dengan ikut serta didalamnya. Bukan sekedar memantau di luar pagar dan memberikan nasihat, tetapi patut memberikan panutan secara langsung cara menjadi politisi yang menjunjung nilai moral dan kebaikan. Kewajiban ini tidak bisa dilepaskan dari status Tuan Guru sebagai pewaris nabi yang menjadi sosok panutan.⁴

Fenomena sosial politik Tuan Guru yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia pasca kolonialisasi, dan khususnya pada era reformasi, menggerakkan mereka untuk memperbaiki sisi politik aktivitas umat muslim. Politik berbasis moral ditawarkan kepada masyarakat sebagai bentuk kepada praktik politik menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh kekuasaan. Latar fenomena sosial politik sekarang ini sangat tepat dalam menawarkan konsep dan praktik politik yang sarat dengan nilai-nilai ethic politic (Etika politik).

² Agus Dedi Putrawan, *Runtuhnya Karisma Tuan Guru* (Mataram, 2017), 9–10.

³ Muhammad Amin, *Mengislamkan kursi dan meja: dialektika ulama dan kekuasaan* (Pustaka Pelajar, 2009), 86–97

⁴ Putrawan, *Runtuhnya Karisma Tuan Guru*, 10–11

Belakangan ini pejabat-pejabat Negara termasuk elit politik tanah air sering mengunjungi Pondok pesantren, dengan maksud silaturahmi serta memperkokoh ukhuwah Islamiyah, melalui berbagai konsep dan strategi dilapangan dengan harapan dapat mencuri perhatian Tuan Guru, santri dan masyarakat sekitar sehingga menjadi agenda cukup penting para elite politik untuk dapat melakukan blusukan ke pesantren-pesantren supaya memperoleh restu dan dukungan dari para Tuan Guru, pembina, alumni, simpatisan, dan santri karena dipercaya bahwa salah satu lembaga pendidikan yang mampu menjadi penopang dalam bursa pencalonan politik di Indonesia adalah pesantren.

Pondok pesantren berperan sebagai lembaga pendidikan dalam segi keagamaan (tafaqquh fi addien) serta menjadi lembaga layanan sosial di masyarakat (dakwah), merujuk pada Al-Qur'an surah At-Taubah 122. Pesantren berperan sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan terkait ilmu agama dan nilai-nilai kesantunan kurangdiperhatikan oleh para politisi atau pemangku jabatan. Sedangkan peran dalam lembaga dakwah yang berkaitan dengan masyarakat, begitu menarik perhatian para politisi dalam mendongkrak hak suara politiknya karena kedudukan Tuan Guru sebagai pendiri serta pengeloladi pondok pesantren mempunyai karisma yang sangat besar di mata santri, alumni, maupun masyarakat sekitarnya. Hermawan Sulisty, seorang Tuan Guru memiliki monopoli interpretasi dan monopoli suara kolektif terhadap dunia luar. Berkenaan dengan basis keagamaan, masyarakat dan para santri akan mendengar titah dan patuh (saman wa thaatan) pada Tuan Guru. Hal ini membuat para politisi pun tidak dapat menganggap remeh dengan pesantren besar yang sudah dibangun puluhan tahun, dan cukup banyak mencetak ribuan, bahkan berjuta santri yang telah menjadi tokoh penting di kalangan masyarakat dan mempunyai lembaga pendidikan sendiri.⁵

Di lain pihak, para Tuan Guru dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pemimpin dan pengelola pondok pesantren terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, Tuan Guru yang menitikberatkan pada pendekatan sosio kultural. Tuan Guru seperti ini cenderung tertutup dan tidak bersedia dikunjungi elit politik dan pejabat pemerintahan. Tradisi dibangun pada Tuan Guru ini untuk menutup diri dari kancan politik yang mempengaruhi kredibilitasnya, terutama politik praktis. Kelompok kedua adalah Tuan guru yang membuka diri pada politik dan ada pula yang ikut serta terlibat langsung dengan politik praktis. Kelompok ini membuka secara lebar pintu untuk para elit politik dan pejabat pemerintahan.⁶ Jadi tidak heran ada beberapa Tuan Guru ikut terjun dalam dunia politik dengan alasan

⁵ Hermawan Sulisty dan Ahmad Suaedy, "Kyai & demokrasi: sebuah potret pandangan tentang pluralisme, toleransi, persamaan, negara, pemilu, dan partai politik (Diterbitkan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2000), 25

⁶ Miftah Faridl, "Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia," MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan 19, no. 2 (8 Juni 2003): 200–201, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v19i2.103>

strategi pragmatis. Tuan Guru memiliki basis massa yang jelas serta kuat, ketika kekuatan tersebut tidak digunakan, maka akan terbuang sia-sia. Oleh sebab itu, dalam definisi yang cukup pragmatis kadang muncul tawar menawar politik dan membangun kontrak politik. Tuan Guru sebagai pengelola pondok pesantren dan pelayanan masyarakat, sudah sepatutnya jika Tuan Guru tidak sekedar mendengarkan keluhan kesah rakyat, tetapi Tuan Guru berhak menyampaikan segala aspirasi umat. Sudah sepatutnya Tuan Guru sebagai pengasuh pondok pesantren menjadi jembatan khusus antara kepentingan rakyat dan para pejabat negara.

Perdebatan seperti itu memang tidak akan pernah selesai, sebab masing-masing akan menunjukkan berbagai argumentasi etis maupun praktis untuk mendukung pendapat mereka. Di dalam penelitian ini, kedua pendapat tersebut akan diletakkan sebagai dasar pijak untuk menjawab permasalahan mengapa banyak Tuan Guru yang terlibat dalam politik, apakah motivasi yang melatar belakangi, bagaimana dampak keterlibatan Tuan Guru dalam politik sebagai pengelola pondok pesantren sebagaimana yang terjadi di Lombok Utara dalam ranah politik praktis bukan saja berdampak pada eksistensi politik pesantren dan komunitasnya, namun juga berakibat luas bagi masyarakat yang selama ini menjadikan pesantren sebagai sumber rujukan keagamaan dan referensi politik.

Berhubungan dengan paparan di atas kami menemukan bahwa ada beberapa pondok pesantren di Lombok Utara yang Tuan Gurunya terlibat dalam politik praktis seperti di pondok pesantren Darul Iman Bentek yang dipimpin oleh TGH. Najmul Akhyar dan pondok pesantren Assyafi'iyah dipimpin oleh TGH. Jamhur Hakim di Lombok Utara. Dalam pengamatan kami keterlibatan kedua tokoh tersebut di atas membawa dampak positif dan negatif terhadap pengelolaan pesantren, sehingga kami ingin meneliti lebih jauh bagaimana keterlibatan mereka dan apa dampak dari keterlibatan mereka dalam berpolitik dimana mereka berposisi sebagai pondok pesantren.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilaksanakan tanpa menggunakan rumus-rumus dan symbol- simbol statistik. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Jadi penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada persoalan kualitas data bukan banyaknya data. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Menurut Issac sebagaimana yang dikenalkan Umar, tujuan adanya pendekatan penelitian untuk menggambarkan secara sistematis ciri dari populasi tertentu secara faktual dan cermat. Dengan kata lain, pendekatan deskriptif merupakan jenis pendekatan penelitian yang melihat pada obyek atau kondisi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta yang akan diselidiki dan hasilnya bisa dipakaidalam mengambil keputusan pada penelitian mendatang. Lokasi atau

tempat penelitian ini yaitu di pondok pesantren yang ada di Lombok Utara diantaranya Pondok Pesantren Darul Iman Bentek, dan Pondok Pesantren Assyafiyyah Menggala.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dalam Moleong berpendapat bahwa data primer atau utama yang dipakai ialah kata-kata dan tindakan dari individu yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil interview dan observasi. Sedangkan data sekunder atau pendukungnya dari sumber kepustakaan dan referensi-referensi lain seperti artikel, jurnal atau dokumentasi lain yang dianggap relevan dengan topik yang akan diteliti dan dapat menunjang sepenuhnya penelitian ini.

Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama (Key Instrument). Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian meliputi: wawancara, observasi serta penggalan dokumen (catatan atau arsip). Adapun analisis data pada penelitian ini mengikuti model Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono yaitu Data Collection, Reduksi Data, Display Data and Conclusions (kesimpulan) dan verifying.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterlibatan Tuan Guru dalam Politik di Pondok Pesantren

Bentuk keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat dari dua sisi yaitu melakukan politik praktis atau terlibat secara langsung dan terlibat secara tidak langsung. Dalam politik praktik tuan guru terjun secara langsung mencalonkan diri baik sebagai kepala daerah. Sedangkan secara tidak langsung tuan guru hanya terlibat sebagai pendukung dan partisipan sebagai pemilih. Selain itu keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara: a) Agar dapat mengelola kehidupan yang lebih baik, b) Dapat mengatur masyarakat sesuai yang diharapkan, c) Kepemimpinan yang memperjuangkan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat, d) Ladang memenuhi kepentingan secara instan, e) agar dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat, agama dan bangsa, f) Kekuasaan yang berlandaskan niat kebaikan, g) Aktivitas untuk kebaikan, dan h) sebagai ruang untuk mengabdikan dan berdakwah.

Creswell menjelaskan tentang studi fenomenologi, bahwa fenomenologi berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala.⁸ Keterlibatan tuan guru dalam politik tidak terbentuk begitu saja. Bila mengacu pada pengertian fenomenologi tersebut, maka makna-makna tadi dihasilkan dari serangkaian alur atau proses pengalaman yang dijalani tuan guru dalam dunianya.

⁷ Yudin Citriadin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (2017), 107

⁸ Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi: Fenomenologi (Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya)*, (Bandung, Widya Padjajaran, 2009), 127

Menurut Schutz, manusia mengkonstruksikan makna di luar arus utama pengalaman melalui proses “tipikasi”. Hubungan antar makna pun diorganisasi melalui proses ini, atau biasa disebut stock of knowledge.⁹

Tuan guru yang terjun dalam politik praktis, memang cukup dilematis dan membawa banyak tantangan namun juga membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat atau masyarakat. Keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren diantaranya.

a. Aktivitas Dakwah

Keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren karena bagi tuan guru dakwah menjadi salah satu jalan dalam membangun ummat baik dengan ucapan maupun perbuatan. Namun untuk mendukung aktivitas dakwahnya dibutuhkan fasilitas seperti sarana dan ekonomi yang mapan. Tuan guru kadang kala merasa kesulitan untuk bisa menjalankan aktivitas dakwah dan kegiatan sosial keagamaannya di masyarakat. sehingga dibutuhkan fasilitas seperti kendaraan dan lain-lain yang dinilai merupakan suatu keharusan yang mesti dimiliki oleh para tuan guru. Hal tersebut ditujukan guna mempermudah proses mobilitas dari aktivitas dakwahnya di masyarakat.

Selain itu, banyak tuan guru yang berpartisipasi dalam politik praktis karena merasa bahwa jalur politik dapat memberikan legitimasi kekuasaan untuk menyiarkan islam dengan mudah kepada masyarakat secara lebih luas. Politik banyak digunakan oleh para tokoh agama seperti tuan guru sebagai salah satu alternatif atau medium untuk menyiarkan islam kepada masyarakat. Melalui kekuasaan tersebut, para tuan guru meyakini bahwa proses dakwah akan menjadi demikian lebih mudah untuk dilakukan.

Keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara adalah untuk memperluas sasaran dakwah. Alasan lain yang melatar belakangi tuan guru untuk berpolitik praktis juga diketahui dikarenakan oleh keinginan untuk dapat melakukan ekspansi atau perluasan terhadap sasaran jama'ah dari kegiatan dakwah tuan guru sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan islam secara lebih luas. Ada tendensi kepentingan dari tuan guru melalui keterlibatannya dalam dunia politik tersebut untuk berusaha memperluas lingkup jama'ah dan organisasi keagamaan yang dimilikinya.

Keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara adalah untuk memberikan nuansa islami dalam kebijakan dan peraturan pemerintah. Salah satu yang melatarbelakangi tuan guru untuk berpartisipasi dalam politik praktis adalah agar dapat ikut serta dalam proses perancangan peraturan atau kebijakan yang ada di pemerintah, baik melalui

⁹ Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi...*,127

legislatif, yudikatif, atau eksekutif, untuk mengakomodir nilai-nilai islam di dalam kebijakan atau peraturan pemerintah tersebut.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara. Tidak ada sumber dana bagi pondok pesantren menjadi perhatian bagi tuan guru. Masuknya tuan guru dalam lingkup kekuasaan tidak jarang didasari oleh keinginan agar aspirasi dari pondok pesantrennya dapat terwakili di pemerintahan. Realitas dari pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang kerap diabaikan nasibnya oleh pemerintah perihal akses sumber-sumber materil dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, mendorong tuan guru untuk bertindak dengan mengambil bagian dalam pemerintahan itu sendiri agar terakomodirnya dana khusus bagi pondok pesantren mereka.

Selain itu, minimnya perhatian pemerintah daerah dalam memberikan bantuan anggaran bagi lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren menyebabkan proses pembangunan pondok pesantren menjadi sangat lambat. Hal inilah kemudian yang menjadi salah satu alasan latarbelakang tuan guru untuk masuk dalam politik kekuasaan. Karena terkadang untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dari lembaga pondok pesantrennya tidak jarang tuan guru terpaksa harus bergantung pada sumber dana bersama dari masyarakat.

c. Membantu Masyarakat

Membantu masyarakat supaya lebih maju dan sejahtera menjadi salah satu alasan keterlibatan tuan guru dalam politik dan pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara. Keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren adalah untuk membangun dan mengembangkan masyarakat agar lebih maju, sejahtera dan mandiri.¹⁰ Lebih jauh dijelaskan bahwa keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara adalah untuk memperoleh keuntungan finansial yang diniatkan dan dihayatkan untuk kepentingan masyarakat dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat.

Keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren bisa membantu persoalan pendidikan dari lembaga pondok pesantren yang dimiliki dengan memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang tidak mampu dan bisa menyantuni para dhoif, dhuafa, dan anak yatim dari keuntungan ekonomi yang didapatkan selama berpolitik.

d. Faktor Pengalaman

Keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten

¹⁰ Wawancara , tanggal 29 Mei 2021

Lombok Utara adalah karena pengalaman tuan guru yang selalu menjadi korban politik tidak lepas dari pengalaman tuan guru yang sering kali menjadi korban kebohongan janji politik dalam setiap kali pemilihan kepala daerah. Basis jama'ah yang besar serta pengaruh ketokohnya yang kuat dalam suatu kelompok masyarakat menyebabkan tuan guru kerap menjadi incaran para politisi untuk memuluskan kepentingan mereka.

Selain itu juga, karena adanya kekhawatiran pribadi tuan guru pada sikap para politisi yang tidak mencerminkan cara berpolitik yang baik sehingga merusak marwah dari politik itu sendiri. Hal inilah yang kemudian banyak mendorong tuan guru untuk masuk dalam politik kekuasaan, yaitu untuk memastikan bahwa politik dipegang oleh orang-orang yang benar-benar mampu menjalankan fungsi politik tersebut sebagaimana mestinya. Bukan dengan iming-iming janji yang berujung pada kebohongan, namun menciptakan politik yang jujur dan adil sebagai media untuk mewujudkan aspirasi, cita-cita maupun harapan dan yang utama untuk memberikan manfaat kebaikan bagi hidup manusia.

Tuan guru menilai bahwa maraknya kasus korupsi dan kasus amoral lainnya yang dialami oleh para politisi dikarenakan 'absennya' peran dari nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masing-masing individu dalam berpolitik. Inilah alasan tuan guru masuk dalam politik kekuasaan sebagai upaya memperbaiki 'image' kekuasaan sebelumnya yang dinilai 'kotor' dan wujud memperjuangkan agama dan perlunya menghadirkan figur pemimpin masyarakat yang baik sosial dan spiritualnya. Sehingga tuan guru sebagai figur ulama yang dinilai mencerminkan nilai-nilai keagamaan tersebut, dirasakan perlu untuk ikut terlibat dalam politik kekuasaan.

Faktor penyebab keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren ini dijelaskan bahwa keterlibatan tuan guru dalam politik disebabkan karena: a) Faktor kekuasaan, meliputi cara-cara untuk mencapai hal yang diinginkan melalui sumber-sumber kelompok yang ada di masyarakat, b) Faktor kepentingan, merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Untuk mengejar kepentingan ini manusia harus memiliki kekuasaan, kesehatan, ketrampilan, kasih sayang, keadilan dan kejujuran, c) Faktor kebijaksanaan sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya berbentuk penundang-undangan, d) Budaya politik, merupakan orientasi subyektif individu terhadap system politik. Kebudayaan politik sebagai orientasi nilai dan keyakinan politik yang melekat dalam diri individu dapat dianalisis dalam beberapa orientasi, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan orientasi evaluatif yang mendasari perilaku politik.¹¹

Keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren dikarenakan

¹¹ Khoiru Ummatin, *Perilaku Politik Kiyai*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), 37

tuan guru menjadi sosok elit sosio kultural dalam masyarakat. Hal itulah yang terjadi di Lombok. Dari sejarah sosio kultural, Tuan Guru memegang peranan penting dalam berbagai aspek baik agama, sosial, budaya, dan politik. Ucapan yang keluar dari mulut Tuan Guru mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat.¹² Sedangkan kesetiaan yang diberikan oleh masyarakat bisa berupa ketundukan, penghormatan, dan kepatuhan, Tuan guru adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat Sasak kepada seseorang karena memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

Kapasitas tuan guru di tengah-tengah masyarakat Lombok sangatlah kompleks dan serbaguna. Tuan Guru bukan hanya sebagai seorang guru yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, Tuan Guru juga bisa berperan sebagai psikater yaitu tempat konsultasi masyarakat berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, baik permasalahan ekonomi, permasalahan tanah warisan permasalahan rumah tangga permasalahan jodoh sampai ke permasalahan kesehatan.¹³

Keterlibatan politik tuan guru baik sebagai ulama' dan umara' dan lainnya tidak lepas dari beberapa peran yang ada pada dirinya yaitu tuan guru sebagai ulama dan tuan guru sebagai penggerak perubahan dan kemandirian kemasyarakatan.

2. Dampak Keterlibatan Tuan Guru Dalam Politik di Pondok Pesantren

Tuan guru sebagai figur atau tokoh yang terlibat dalam dunia politik tentu memiliki banyak dampak bagi perubahan sosial kemasyarakatan baik dibidang pendidikan, sosial, dakwah dan bidang lainnya. Oleh karena itu seorang Tuan Guru dituntut memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Sedangkan tingkat partisipasi politik masyarakat dibidang politik masih tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan dengan sikap dan tingkat kesadaran masyarakat dalam organisasi politik. Dampak keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren diantaranya:

a. Menjadi lebih waspada atau mawas diri

Dalam hal ini, dampak keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara tuan guru menjadi seorang politisi berarti menjadi seorang yang selalu waspada dan selalu menyenandungkan tentang kemenangan, apalagi dalam dunia politik terkenal prinsip "membunuh lawan atau terbunuh oleh lawan". Artinya, seorang politisi tidak bisa hanya berdiam diri. Tanpa berbuat sesuatu untuk menyelamatkan posisi politiknya. Seorang politisi di tuntut untuk cerdik dan cerdas dalam memainkan intrik politik sehingga tidak akan

¹² Jamaludin, *Persepsi dan Sikap Masyarakat Sasak Terhadap Tuan Guru* (Yogyakarta: CRCS-Sekolah Pascasarjana UGM-Depag RI, 2007), h. 7

¹³ Dirdjosanjoto, Pradjarta, *Memelihara Umat, Tuan guru di Anatara Usaha Pembangunan dan Mempertahankan Identitas Lokal di Muri* (Amsterdam: VU University Press, 1994), 124

terkalahkan oleh lawan.¹⁴

Kondisi yang demikian tentu saja berlawanan dengan karakter seorang tuan guru. Nilai-nilai moralitas dan kejujuran yang menjadi ciri khas seorang tuan guru sangat tidak memungkinkan terlibat dalam dunia politik yang sarat dengan intrik. Bisa jadi, dunia politik bagi tuan guru sama halnya dengan masuk ke mulut singa yang akan meruntuhkan segala jati diri yang di sandang. Mungkinkah tuan guru berbohong, saling fitnah, saling jatuhmenjatuhkan karena merebut jabatan politik.

Bagi seorang tuan guru perilaku tersebut tidak mungkin bisa dilakukan, tetapi bagi seorang politisi perilaku tersebut sangat mungkin untuk dilakukan. Apalagi seorang politisi selalu mendewakan kemenangan, bisa jadi akan dicapai dengan cara-cara yang baik atau kurang baik. Di sinilah intrik politik untuk selalu menang akan terus bekerja.

b. Lebih Menjaga Kesederhanaan dan Religiusitas

Dampak keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara yang pada awalnya akrab dengan aksesori “sarung” sebagai simbol kesederhanaan dan religiusitas, akhirnya beralih ke aksesori yang melambangkan kaum elitis yang jauh dari kesederhanaan masyarakat bawah. Bahkan, kopiah dan songkok yang menjadi identitas kultural tuan guru mulai hilang di telan oleh posisinya sebagai kaum birokrat. Melepas kopiah yang sebelumnya menjadi sesuatu yang tabu, karena bagi masyarakat tradisional telah mengakar dalam benak mereka bahwa memakai kopiah (tidak membuka kepala) merupakan bagian dari akhlak, akhirnya menjadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh para tuan guru.

Dampak keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren sering kali menunjukkan tuan guru yang pada awalnya sangat menjaga penampilan (minimal tetap dengan kopiah) sering kali tampil di depan publik dengan melepaskan identitasnya “kopiahnya”. Tanpa disadari mereka telah mulai kehilangan identitas dan nilai-nilai kulturalnya. Sikap tersebut sedikit demi sedikit dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tuan guru tersebut. Apalagi di tengah-tengah masyarakat, tuan guru notabene telah di posisikan sebagai figur suci, layaknya kertas putih yang sangat putih, apabila ia terkena setitik warna hitam akan menjadi noda yang sangat kentara.

Tuan guru memiliki beberapa tipe dalam mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan sosial masyarakat yaitu: a) Tuan guru Langgar, yaitu tuan guru yang mengajar para santri di langgar atau di mushola kecil. Biasanya tuan guru ini tinggal di desa-desa yang tidak memiliki pondok pesantren yang dihuni oleh para santrinya, tetapi tuan guru ini mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat sekitar, b) Tuan guru Pesantren, yaitu tuan guru yang mempunyai pondok pesantren yang dihuni oleh para santri yang menuntut ilmu agama

¹⁴ Wawancara, tanggal 16 Juni 2021

dari pelosok kampung. Di pondok pesantren inilah seorang tuan guru mengajarkan berbagai kitab klasik kepada para santrinya, c) Tuan guru Mubaligh, yaitu tuan guru yang melaksanakan dakwah dan pengajian di desa-desa dan tempat lain. Biasanya tuan guru ini tidak memiliki pondok pesantren layaknya tuan guru pesantren lainnya, d) Tuan guru Politik, yaitu tuan guru yang banyak terjun kedalam politik praktis meskipun dia menyempatkan diri dalam proses pembelajaran di madrasah dan pesantren, e) Tuan guru Madrasah, yaitu tuan guru yang tugas dan pekerjaannya adalah mengajar para santri di madrasah.¹⁵

Dalam realitannya, tuan guru memiliki wajah tidak tunggal, artinya tidak hanya tuan guru pondok pesantren, sebab seorang tuan guru tidak hanya mempunyai satu kapasitas saja, terkadang lebih dari satu kapasitas. Mungkin tuan guru itu termasuk tuan guru pesantren namun dia juga sangat disegani dalam dunia politik. Ada juga tuan guru yang aktif dalam kegiatan dakwah dari kampung ke kampung, tetapi dia juga sebagai Mursid salah satu aliran tarekat. Bahkan terkadang ada satu tuan guru yang memiliki semua kriteria tuan guru seperti yang diatas. Artinya tuan guru itu pantas menyandang keempat kriteria tuan guru diatas. Disamping tuan guru tersebut memiliki pesantren, dia juga aktif dakwah keliling daerah, aktif dalam politik praktis dan juga dia sebagai mursid salah satu aliran tarekat termasuk tuan guru di madrasah.

3. Kendala Yang Dihadapi Tuan Guru Dalam Pengelolaan Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga penyelenggara pendidikan di Indonesia yang diatur dan diakui oleh pemerintah. Secara historis kemunculan pondok pesantren tersebut mempunyai ciri khas tersendiri antara lembaga yang satu dengan lainnya. Sebagai sebuah system pendidikan islam mempunyai komponen input, proses dan output. Ketiga komponen tersebut harus dikelola dan diatur dengan manajemen yang profesional untuk menghasilkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Dalam pengelolaannya pondok pesantren tersebut selalu dihadapkan dengan berbagai problem dalam pengembangannya, baik dari dalam maupun dari luar. Identifikasi terhadap problematika yang ada merupakan langkah awal dalam upaya perbaikan secara terus-menerus terhadap kualitas lembaga pondok pesantren tersebut. Kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren diantaranya

Pertama: Masalah Kenakalan Santri (santri). Kenakalan santri merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren. Kenakalan santri tersebut seperti adanya santri yang tidak mentaati kode etika pondok pesantren. Bahkan sebagian mereka acuh tak acuh terhadap kode etik (aturan) baik dalam berpakaian maupun lainnya yang diterapkan di pondok pesantren. Kenakalan santri dalam mengikuti dan

¹⁵ Eko Setiawan Kyai dalam Politik Ar-Risalah, Vol XIII No. 1 April 2014, 5

mentaati kode etik pondok pesantren dapat berdampak pada sikap dan perilaku yang tidak baik pada diri santri, sebab baik atau buruknya sikap dan perilaku yang ditampilkan oleh santri dalam pondok pesantren akan mencerminkan kepribadian santri itu sendiri dan juga berdampak pada citra yang tidak baik pada pondok pesantren. Teman bergaul yang baik (tidak nakal) akan berpengaruh baik pada diri siswa, begitu pula sebaliknya teman bergaul yang tidak baik (nakal) akan berpengaruh buruk pada sikap dan perilaku santri¹⁶.

Kedua: Ketidaksiplinan santri. Ketidaksiplinan santri juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren. Ketidaksiplinan santri tersebut seperti santri tidak tepat waktu (terlambat) masuk sekolah, keluar pada saat jam pelajaran di sekolah. Di samping itu dalam kode etik anak didik juga masih kurang tertib, rapi dan sopan. Hal ini terlihat dari adanya santri yang menggunakan pakaian sekolah yang ketat (tidak longgar) dan sebagian ada yang tidak memasukkan baju ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung di sekolah. Kedisiplinan ini adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab pada diri seseorang untuk mengatur, mengendalikan dan mengontrol tingkah laku dan sikap hidupnya agar seluruh keberadaannya tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri¹⁷.

Ketiga: Kurangnya motivasi belajar santri. Kurangnya motivasi belajar santri dalam proses pembelajaran juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren seperti memberikan nasehat dan semangat atau dorongan kepada santri untuk rajin belajar, memberikan penghargaan berupa hadiah bagi santri berprestasi yaitu bagi santri yang mendapat rangking satu, dua dan tiga, memberikan sanjungan atas hasil belajar dan tugas yang dapat dilakukan tepat pada waktunya. Motivasi belajar adalah keadaan internal organisme baik manusia yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu atau bertindak laku secara terarah¹⁸.

Keempat: Lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren. Lingkungan yang tidak sehat seperti lingkungan pergaulan bebas dan sikap malas dalam belajar, tidak hormat kepada guru, tidak saling menghargai dan mengormati antar sesama teman, suka bermain pada waktu belajar serta mengganggu teman dalam belajar juga merupakan salah satu penghambat dalam manajemen mutu pendidikan Islam di pondok pesantren, sebab lingkungan yang tidak sehat ini menyebabkan sikap dan perilaku serta pola pikir anak didik menjadi rusak dan melakukan perbuatan yang negatif seperti melanggar kode etik atau norma-norma yang diterapkan di sekolah.

¹⁶ Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2003), 71

¹⁷ Unaradjan, Dolet, Manajemen Disiplin (PT. Gramedia Indonesia: Jakarta, 2003), 1

¹⁸ Muhibbin, Syah, Psikologi Belajar (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2006), 151

Kelima: Kurangnya perhatian orang tua santri. Kurangnya perhatian orang tua santri juga menjadi kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren seperti kurangnya bimbingan dan arahan (nasihat) yang diberikan kepada anak didik terutama dalam belajar, kurang memberikan pendampingan dan kontrol terhadap belajar anak, kurangnya perhatian orang tua santri tersebut dapat menyebabkan anak didik memiliki sikap dan perilaku belajar yang tidak baik. Selain itu kurangnya perhatian orang tua santri juga karena kesibukan orang tua santri seperti mengurus rumah tangga, pergi ke kantor untuk kerja, sehingga anak didik kurang mendapat perhatian dari orang tua baik dalam belajar maupun dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua dalam lingkungan keluarga adalah institusi pendidikan utama dan pertama bagi anak, sebab seorang anak pertama kali mengenal pendidikan dalam lingkungan melalui orang tua atau keluarga¹⁹.

Kenam: Kemampuan Ekonomi Orang Tua Santri. Lemahnya kemampuan ekonomi orang tua santri juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren. Kondisi ekonomi orang tua santri menjadi salah satu hambatan dalam manajemen mutu pendidikan Islam di madrasah. Selain itu, lemahnya ekonomi orang tua santri menyebabkan Pondok pesantren mengalami kesulitan terutama dalam merealisasikan program yang ada, meskipun dalam peraturan pemerintah santri yang tidak mampu akan ditanggung atau diberikan beasiswa, tetapi tidak semua santri yang diberikan beasiswa. Salah satu indikatornya tampak dari pekerjaan orang tua yang sebagian ada yang bekerja sebagai guru, petani, buruh, pejabat dan lainnya. Artinya tidak semua orang tua santri yang ada di Pondok pesantren memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi tetapi ada yang tingkat ekonominya tinggi, sedang dan rendah dalam kehidupan sehari-hari.

Ketidakmampuan keluarga anak didik sangat mempengaruhi pendidikan anak didik untuk membiayai segala proses dan kebutuhan yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam suatu jangka tertentu²⁰. Jadi, kondisi ekonomi keluarga sangat menentukan kelanjutan pendidikan anak didik. Kondisi belajar anak yang tidak memadai juga sangat mempengaruhi proses dan hasil belajar anak didik baik di sekolah maupun di luar sekolah.

KESIMPULAN

Bentuk keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren dapat dilihat sebagai pengurus struktural partai politik, keterlibatan tuan guru sebagai calon legislatif dan eksekutif, wujud dukungan suara yang diberikan oleh tuan guru biasanya diberikan kepada

¹⁹ Rehani, Revolusi Belajar Berdasarkan Al Qur'an (PT. Rosda Karya: Bandung, 2003), 129, 26

²⁰ Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya (Rineka Cipta: Jakarta, 2003), 56

calon yang dikehendaki baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan politik tuan guru memiliki orientasi yaitu orientasi pragmatis adalah dimana Tuan guru memosisikan dirinya sebagai “elit lokal” dan orientasi pragmatis seperti tidaklah mudah dilihat dan diteliti. Keterlibatan politik praktis tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren juga dilakukan dengan melakukan politik praktis yaitu tuan guru terjun langsung ke gelanggang pilkada, melakukan politik tidak langsung. Selain itu juga keterlibatan politik tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren karena panggilan dakwah, faktor ekonomi, membantu masyarakat dan faktor pengalaman.

Dampak keterlibatan tuan guru dalam politik di pondok pesantren adalah meningkatnya status sosial, dapat bermanfaat secara lebih luas kepada masyarakat dan menumbuhkan wawasan dan pengalaman baru. Menjadi lebih waspada atau mawas diri dimana tuan guru menjadi seorang politisi berarti menjadi seorang yang selalu waspada dimana dunia politik terkenal prinsip “membunuh lawan atau terbunuh oleh lawan. Kemudian lebih menjaga kesederhanaan dan religiusitas. Biasanya tuan guru akrab dengan cirri khasnya yang sholeh dan islami sebagai simbol kesederhanaan dan religiusitas, akhirnya beralih ke aksesori yang melambangkan kaum elitis yang jauh dari kesederhanaan masyarakat bawah

Kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam politik di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara. Dalam hal ini pengelolaan pondok pesantren oleh tuan guru di Kabupaten Lombok Utara dimulai dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pergerakan (actuating) dan pengawasan (controlling). Sedangkan kendala yang dihadapi oleh tuan guru dalam pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Utara masalah kenakalan santri (santri), ketidakdisiplinan santri, kurangnya motivasi belajar santri, lingkungan pergaulan yang tidak sehat, kurangnya perhatian orang tua santri dan kemampuan ekonomi orang tua santri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., (2009). *Mengislamkan kursi dan meja: dialektika ulama dan kekuasaan*, Pustaka Pelajar.
- Anwar. (2013). *Dinamika Peran Politik Tuan Guru Di Lombok Era Reformasi*.
- Citriadin, Y., (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Dolet, U., (2003). *Manajemen Disiplin*, PT. Gramedia Indonesia: Jakarta.
- Faridl, M., (2003). Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. 19 (2), 200–201, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v19i2>.
- Fealy, G., (2003). *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS.

- Fitriani, M., (2016). Kepemimpinan Kharismatis-Transformatif Tuan Guru Dalam Perubahan Sosial Masyarakat Sasak-Lombok Melalui Pendidikan. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16 (1). <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.332>.
- Haramain, M., (2019). *Dakwah Moderasi Tuan Guru: Kajian Pemikiran dan Gerakan Dakwah Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abd. Madjid*" (IAIN Parepare Nusantara Press.
- Jamaludin. (2007). *Persepsi dan Sikap Masyarakat Sasak Terhadap Tuan Guru*
- Kuswarno, E., (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi: Fenomenologi (Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya)*. Bandung. Widya Padjajaran.
- Pradjarta, D., (1994) *Memelihara Umat, Tuan guru di Antara Usaha Pembangunan dan Mempertahankan Identitas Lokal di Muri* Amsterdam: VU University Press.
- Putrawan, A. D., (2017). *Runtuhnya Karisma Tuan Guru*, Mataram.
- Rehani. (2003). *Revolusi Belajar Berdasarkan Al Qur'an*. PT. Rosda Karya: Bandung.
- Setiawan, E., (2014). Kyai dalam Politik. *Ar-Risalah*, Vol XIII No. 1 April.
- Slameto. (2003) *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Subiyakto, R., *Panggung Politik Kiai di Era Pemilukada*, t.t
- Sulistyo, H., & Suaedy, A., (2000). *Kyai & demokrasi: sebuah potret pandangan tentang pluralisme, toleransi, persamaan, negara, pemilu, dan partai politik* (Diterbitkan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta bekerjasama dengan The Asia Foundation.
- Surbakti, R., (1992) *Memahami ilmu politik*, Grasindo.
- Syah, M., (2006) *Psikologi Belajar*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Ummatin, K., (2002). *Perilaku Politik Kiyai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.